

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN TERHADAP ISU
ISLAMOFOBIA DI ERA PEMERINTAHAN IMRAN KHAN**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUKHMAMMAD AFIF BAKHTIAR

18323148

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN TERHADAP ISU
ISLAMOFOBIA DI ERA PEMERINTAHAN IMRAN KHAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional**



Oleh:

MUKHMAMMAD AFIF BAKHTIAR

18323148

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN TERHADAP ISU
ISLAMOFOBIA DI ERA PEMERINTAHAN IMRAN KHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

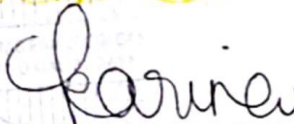
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal:
12 April 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

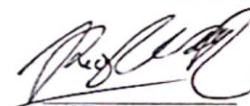
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.



2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.



3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.



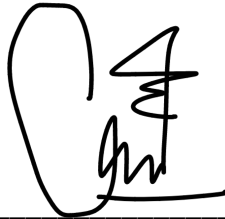
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

13, April 2023



Mukhammad Afif Bakhtiar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Signifikansi Penelitian	13
1.5 Cakupan penelitian	15
1.6 Tinjauan Pustaka	15
1.7 Kerangka Pemikiran	18
1.8 Metode Penelitian	24
<i>1.8.1. Jenis Penelitian</i>	24
<i>1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian</i>	25
<i>1.8.3. Metode Pengumpulan Data</i>	25
<i>1.8.4. Proses Penelitian</i>	25
1.9 Sistematika Pembahasan	26
BAB 2 Kebijakan Luar Negeri Pakistan di Era Imran Khan	27
2.1. Prinsip Kebijakan Luar Negeri Pakistan Sebelum Imran Khan	27
2.2. Kebijakan Luar Negeri Imran Khan Terhadap Isu Islamofobia	29
2.3. Definisi Islamofobia Secara Umum	32
BAB 3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Imran Khan dalam melakukan Pembuatan Kebijakan Anti-Islamofobia di Politik Internasional	35
3.1. Faktor Politik Domestik	35
<i>3.1.1 Politik Internasional sebagai Penguatan Legitimasi Imran Khan dalam Pemerintahan Negara Pakistan</i>	37
3.2. Faktor Ekonomi	39
<i>3.2.1. Kerjasama Ekonomi dengan Negara Islam untuk Memperkuat Ekonomi Pakistan</i>	41
3. 3. Konteks Internasional	43
<i>3.3.1. Anti-Islamofobia di Politik Global sebagai Agenda Politik Bersama</i>	44

BAB 4	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aplikasi Teori

DAFTAR SINGKATAN

9/11:	Tanggal 9 Bulan September
ISIS:	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
EENI:	<i>Ecole d'Affaires / Escuela de Negocios</i>
PML-N:	<i>Pakistan Muslim League-Nawaz</i>
UNGA:	<i>United Nations General Assembly</i>
OIC:	<i>Organization of Islamic Cooperation</i>
FIANZ	<i>Federation of Islamic Associations of New Zealand</i>
PBB:	Perserikatan Bangsa-bangsa
OKI:	Organisasi Kerjasama Islam
D-8:	<i>Development-8</i>
PTA:	<i>Preferential Trade Agreement</i>
AACM:	<i>Administrative Assistance in Customs Matters</i>
MBT-2000:	<i>Main Battle Tank</i>
APC	<i>All Parties Conference</i>
JUI-F	Jamiat Ulema-e-Islam
NATO:	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persepsi negatif terhadap Islam dan umat muslim atau *prejudice* prasangka yang tidak baik terhadap agama Islam dan umat muslim merupakan banyak bahasa dari Islamofobia. Kata Islamofobia adalah suatu kata yang tidak dapat dijauhkan dari sebuah kegiatan politik dan sosial dalam tingkatan lokal maupun global. Peristiwa ini muncul sejak peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, di mana serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku dirinya sebagai umat muslim telah meningkatkan ketegangan dan kebencian terhadap Islam dan umat muslim di seluruh dunia. (Rahmani 2022)

Seiring berjalannya waktu, isu Islamofobia semakin meningkat jumlahnya, sejak serangan September 11 yang terjadi di Amerika Serikat muslim di negara-negara Barat (Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Australia dan New Zealand) mengalami serangan dan diskriminasi yang sangat mengancam keamanan dan hak manusia pada umumnya. Hal ini terbukti melalui dari beberapa peristiwa yang sudah ada, seperti peristiwa kekerasan secara rasial atau Rasis yang terjadi di seluruh benua Eropa. Kekerasan secara rasial tersebut mengakibatkan muslim di negara Eropa mengalami target utama dari tindakan penyerangan secara rasial tersebut. Terdapat kurang lebih 21 juta muslim Eropa mengalami permasalahan yang timbul dari dampak Islamofobia itu dimana muslim di Eropa mendapatkan sebuah tindakan kekerasan mulai dari kekerasan fisik, diskriminasi di lingkungan pekerjaan, diskriminasi di segala instrumen sosial seperti lingkungan masyarakat,

agensi perumahan, mengalami vandalisme di beberapa masjid dan bangunan-bangunan Islam lainnya hingga pembunuhan. Semua tindakan yang dilakukan terhadap umat muslim tersebut terjadi hanya karena permasalahan identitas saja, stereotip mengenai bahwa semua umat Muslim sebagai teroris dan penjahat dunia juga salah satu faktor pembantu naiknya permasalahan global ini. (Vandebelt 2021)

Seperti yang diketahui, isu Islamofobia semakin meluas dan meledak jumlahnya. Salah satunya juga terjadi di benua Australia. Islamofobia di benua Australia mengakibatkan setidaknya 280,000 muslim mengalami tindakan rasisme. Hal ini terbukti dengan salah satu peristiwa dilarangnya cadar yang menjadi ciri khas dari wanita muslim. Cadar ini dinilai tidak cocok dengan latar belakang Australia yang mempunyai identitas Judeo-Christian. Tidak hanya di Australia saja, benua Oceania juga mengalami dampak yang sama dari isu Islamofobia ini. Sehingga mengakibatkan adanya sebuah pernyataan deklarasi dari partai Islam yang bernama *Federation of Islamic Associations of New Zealand* (FIANZ) yang menyatakan bahwa mereka (FIANZ) tidak akan mengancam New Zealand dan akan taat kepada aturan yang sudah dibuat sehingga FIANZ menyatakan dengan tegas bahwa negara New Zealand tidak perlu khawatir dengan isu Islamofobia yang telah terjadi di ruang lingkup global dan keamanan negara New Zealand itu sendiri. (Vandebelt 2021)

Pakistan adalah salah satu negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia. Meskipun mayoritas penduduknya adalah umat muslim, negara ini juga memiliki minoritas agama lain seperti Hindu Kristen dan Budha. Setelah mengalami kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, Pakistan mengalami beberapa konflik internal, terutama terkait dengan perbedaan agama dan etnis.

Latar belakang politik Pakistan dimulai dengan adanya krisis pemerintahan yang terjadi setelah adanya kemerdekaan dari Inggris di tahun 1947. Berbagai macam isu bermunculan seperti munculnya pemerintahan yang otoriter, kekuasaan eksekutif yang tumpang-tindih, terjadinya darurat militer dan perpecahan etnis yang disebabkan oleh konflik internal ikut mewarnai negara Pakistan di era krisis pemerintahan. (Rehman, 1998, 149-151).

Setelah berhasil berjuang melewati pemerintahan yang bertumpu pada kekuasaan militer, dinamika politik negara Pakistan semakin membaik, kekuatan militer pun semakin berkurang setiap tahunnya dimana tepat pada 12 Mei 2007 ribuan orang di Karachi melakukan demonstrasi besar-besaran guna menentang Presiden Musharraf yang telah menyalahi undang-undang Pakistan untuk kepentingan pribadinya, atas dasar peristiwa tersebut menghasilkan adanya penurunan dari jumlah intervensi militer dalam melakukan kegiatan politik Pakistan. (DAWN 2007).

Meskipun demikian, keterlibatan militer dalam kegiatan politik luar negeri negara Pakistan pun masih terjadi walaupun kekuatan yang dimilikinya tidak sekuat di era pasca kemerdekaan 1947. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi pemerintahan sipil guna meningkatkan kekuatan demokrasi agar pemerintahan Pakistan menjadi lebih *Civil* tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dalam kegiatan politik domestik maupun internasional mereka dan menjadi lebih demokratis

Secara ekonomi, Pakistan juga merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang sangat buruk, pada tahun 2018, mata uang negara Pakistan Rupee mengalami devaluasi yang sangat tinggi. Mata uang Rupee turun drastis

hingga ke angka 5% dari catatan terendahnya. Hal ini disebabkan oleh tindakan devaluasi yang dilakukan oleh bank sentral pada 1 tahun terakhir karena pada saat proses perlawanan Pakistan terhadap krisis neraca pembayaran. (Farras and CNBC Indonesia 2018).

Sedangkan secara militer, Pakistan dinilai memang sudah cukup baik. Walaupun beberapa ancaman masih kerap terjadi di negara tersebut. Ancaman internal seperti Terrorisme dan Ekstremisme masih menjadi permasalahan utama Pakistan dalam tingkatan domestik. Walaupun begitu, pemerintah negara Pakistan berhasil menangani permasalahan tersebut dengan cukup baik melalui kebijakan yang tegas dengan melakukan pendekatan secara politik, ekonomi dan militer secara bersama.

Imran Khan sendiri merupakan perdana menteri negara Pakistan yang resmi diangkat pada tahun 2018. Imran Khan merupakan salah satu aktor politik yang tidak mempunyai latar belakang politik sebelumnya, sebelum menjadi perdana menteri, Imran Khan bermain sebagai pemain professional olahraga kriket. (Shantika and CNN Indonesia 2018)

Pada awal pemilihannya, Imran Khan mempunyai beberapa partai oposisi yang tidak setuju dengan Imran Khan menjabat sebagai perdana menteri negara Pakistan bukan karena latar belakang Imran Khan sebagai pemain professional kriket, tetapi Partai oposisi seperti *All Parties Conference (APC)*, *Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)* dan *Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F)* tidak setuju dengan pemilu yang membuat Imran Khan memenangkan kursi parlemen bersama dengan partai *Pakistan Tehrek-e-Insaf* dengan alasan mungkin terdapat beberapa kegagalan pada saat kegiatan tersebut berlangsung, protes ini

dilaksanakan 1 hari setelah pengumuman kandidat kepresidenan negara Pakistan berdasarkan pemungutan suara yang telah dimenangkan oleh Imran Khan, partai oposisi menganggap bahwa pemilu pada tahun 2018 itu merupakan pemilu yang kotor. Menurut ketua partai *Jamiat Ulema-e-Islam*, Maulana Fazalur Rehman, “Pemilu ini merupakan perampokan dan pemilu ini akan diadakan pemilihan ulang, protes tersebut didasari atas faktor bahwa demokrasi akan disandera dari negara jika Imran Khan memenangkan kursi pemerintahan”. Sedangkan PML-N mengatakan bahwa hasil pemungutan suara yang didapatkan oleh Imran Khan merupakan hanyalah sebuah rekayasa militer semata. (Shantika and CNN Indonesia 2018)

Tidak hanya itu, beberapa pengamat politik dari luar negeri seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat juga berpendapat bahwa pemilu yang telah dimenangkan oleh Imran Khan mempunyai beberapa kejanggalan. Mereka mencurigai bahwa kekuatan militer yang sedang berkuasa di Pakistan mempunyai intervensi dengan kegiatan pemilu tersebut, karena menurutnya kekuatan militer ingin kembali merebut kekuasaan dengan melakukan intervensi yang mengakibatkan Imran Khan memenangkan kursi parlemen. (Shantika and CNN Indonesia 2018)

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, penulis dalam tulisan skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa Imran Khan menerapkan kebijakan yang melawan Islamofobia dalam politik luar negeri Pakistan. Penulis mencoba meneliti, memahami dan menganalisa tulisan yang sudah didapat dari sumber-sumber sekunder seperti E-book, Internet, Artikel Jurnal, Website

pemerintahan dan beberapa sumber kredibel lainnya agar mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Imran Khan menerapkan kebijakan yang melawan Islamofobia dalam politik luar negeri Pakistan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui definisi Islamofobia dalam ruang lingkup politik luar negeri
2. Mengetahui mengapa Imran Khan ingin melawan isu Islamofobia
3. Mengetahui mengapa Imran Khan menerapkan kebijakan yang melawan Islamofobia
4. Mengetahui aktor-aktor siapa saja yang terlibat pada saat kebijakan Imran Khan mengenai Islamofobia dibuat

1.4 Signifikansi Penelitian

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah acuan sebuah negara dalam melakukan kegiatan politik luar negerinya dalam ruang lingkup internasional. Hal ini mencakup segala tindakan antar negara yang mempunyai kepentingan bersama, interaksi, dan tujuan bersama. Proses dari kebijakan luar negeri harus selalu diawasi dan dievaluasi secara terus-menerus sehingga kedua belah pihak

yang merupakan aktor dari adanya sebuah kebijakan luar negeri akan merasakan manfaat yang merata dan adil.

Adanya kebijakan luar negeri yang baik akan menghasilkan dampak yang signifikan dari sebuah negara yang melakukan kegiatan politik luar negeri satu sama lain, terlebih jika negara tersebut merupakan negara yang berkembang, maka dampak yang akan dihasilkan akan sangat signifikan bagi negara dan masyarakat didalamnya.

Jika membicarakan kebijakan luar negeri, pastinya tidak akan jauh dari kata politik domestik itu sendiri. Karena sebuah negara menciptakan sebuah kebijakan luar negeri bukanlah tanpa alasan. Sebuah negara menggunakan faktor domestik politik mereka sendiri untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuatan sebuah kebijakan luar negeri. Faktor domestik tersebut bisa meliputi politik domestik, ekonomi domestik dan kekuatan militer.

Sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab mempertimbangkan hal tersebut sebagai acuannya dalam membuat kebijakan luar negeri yang baik. Kebijakan luar negeri yang baik akan menciptakan sebuah manfaat yang sangat signifikan pada sektor yang terpenting dalam sebuah negara yaitu sektor perekonomian. Jika membicarakan sektor perekonomian yang baik, maka hasil yang didapatkan adalah mobilitas dan kesehatan masyarakat yang baik juga. Tentunya, jika kondisi kesehatan masyarakat yang baik, maka perekonomian yang dihasilkan juga akan sangat baik, kedua hal tersebut mungkin memang seperti 1 paket yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Tidak hanya itu, suatu pemerintahan juga akan merasakan dampak yang signifikan jika mereka berhasil menciptakan sebuah kebijakan luar negeri yang

baik. Dampak yang dihasilkan selain untuk negara dan masyarakat yang ada didalamnya, suatu pemerintahan akan mendapatkan dampak yang signifikan berupa *Image* kepemimpinan yang kuat dalam tingkatan domestik maupun internasional.

Terakhir yang tidak kalah penting adalah, sebuah kebijakan luar negeri yang baik tentunya juga akan mempengaruhi konteks internasional yang ada. Seperti adanya sebuah kampanye yang akan dilakukan oleh kandidat DPR pada saat ingin mengadakan pemilihan umum. Hal ini dapat berpengaruh secara signifikan tentunya dalam konteks global yang lebih luas.

1.5 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Pakistan terkait dengan isu Islamofobia di era pemerintahan Imran Khan. Cakupan penelitian ini meliputi analisis tentang kebijakan luar negeri Pakistan terkait dengan isu islamofobia di era pemerintahan Imran Khan pada saat periode dimana Imran Khan menjabat sebagai perdana menteri Pakistan tahun 2018-2022 serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonomi Pakistan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan meliputi berbagai sumber informasi yang terkait dengan kebijakan luar negeri Pakistan terkait dengan isu islamofobia di era pemerintahan Imran Khan. Sumber-sumber informasi tersebut akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan riset internet. Studi

dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, artikel atau apapun itu yang bersifat valid yang terkait dengan kebijakan luar negeri Pakistan dan studi kasusnya mengenai Islamofobia. Selain itu, tinjauan pustaka juga akan mengumpulkan pandangan para ahli terkait dengan kebijakan luar negeri Pakistan tersebut. Tinjauan pustaka ini akan membantu dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai studi kasus yang akan dibahas oleh penulis.

1. Dalam Artikel Jurnal yang berjudul “The Post-September 11 Rise of Islamophobia: Identity and the ‘Clash of Civilizations’ in Europe and Latin America” oleh Kristin Vandebelt menjelaskan mengenai mengapa isu Islamofobia populer di negara di Amerika Serikat dan negara “Barat” tetapi tidak dengan negara Amerika Latin. Artikel tersebut berisikan mengenai penjelasan Islamofobia secara mendasar, seperti defnisi umum dan kategorinya, dan mengeksplorasi isu-isu identitas masyarakat yang ada di negara Amerika Serikat, Eropa dan Australia & Oceania dengan mencoba mengkomparasikan isu tersebut dengan kejadian September 11 dimana akar dari meningkatnya isu Islamofobia. Artikel Jurnal ini juga menggunakan Thesis dari Samuel Huntington yang berjudul *Clash of Civilization* yang digunakan untuk sumber referensi dalam percobaannya menjawab pertanyaan mengenai mengapa Islamofobia tidak meledak di Amerika Latin. (Vandebelt 2021)

2. Dalam Artikel Jurnal yang berjudul *Islamophobia Defined: The Inquiry into a working definition of Islamophobia* oleh All Party Parliamentary Group on British Muslims menjelaskan definisi Islamofobia secara mendalam. Definisi tersebut dikumpulkan dari beberapa golongan masyarakat dan gender dari negara Inggris untuk mendefinisikan kata Islamofobia menurut pendapat mereka masing-

masing yang pada akhirnya jawaban tersebut dikumpulkan menjadi 1 definisi yang berlaku untuk semua golongan masyarakat. Tidak hanya itu, Artikel Jurnal tersebut juga merangkum kategori-kategori apa saja yang termasuk kedalam tindakan Islamofobia. Terakhir yang tidak kalah penting, Artikel Jurnal ini juga berusaha mencari solusi dari akar permasalahan yang menyebabkan Islamofobia di negara Inggris. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017)

3. Dalam website pemerintahan negara Pakistan yang berjudul *Guiding Principle of Pakistan's Foreign Policy* menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Pakistan mengikuti prinsip damai dan stabil. Damai yang artinya Pakistan akan menguatamakan perdamaian dalam penyelesaian masalahnya dan stabil yang artinya Pakistan ingin menciptakan kestabilan negaranya pada saat mengikuti kegiatan politik luar negeri.

4. Dalam artikel jurnal yang berjudul "The Christchurch Attacks: Livestream Terror in the Viral Video Age" oleh Graham Macklin menjelaskan salah satu contoh dari sebuah studi kasus Islamofobia yang terjadi di benua Oceania, tepatnya di negara New Zealand. Serangan tersebut seperti yang dijelaskan di artikel jurnal tersebut merupakan serangan terorisme yang sangat brutal, Brendan Tarrant, seorang ekstremis dari negara Australia telah membunuh setidaknya 51 orang didalam 2 masjid yang berbeda, dimana 2 masjid tersebut bisa diasumsikan dihadiri oleh semua orang muslim didalamnya. Yang menjadikan peristiwa terror ini unik adalah Brendan Tarrant, pelaku tindakan terror dari peristiwa 15 Maret 2019 tersebut melakukan sebuah siaran langsung di aplikasi media sosial *Facebook*.

Pada penelitian ini, penulis mengharapkan hasil yang akan digunakan sebagai pelengkap dari tulisan literatur yang telah dibuat sebelumnya. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap isu Islamofobia di era pemerintahan Imran Khan dengan menggunakan konseptual teori *Decision Making* yang berfokuskan kepada faktor apa saja yang mendorong para *Decision Makers* dalam melakukan pembuatan kebijakan luar negerinya. Dengan menggunakan konseptual teori tersebut, penulis mengharapkan dapat mengetahui faktor pendorong yang digunakan oleh Imran Khan dalam melakukan pembuatan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap isu Islamofobia.

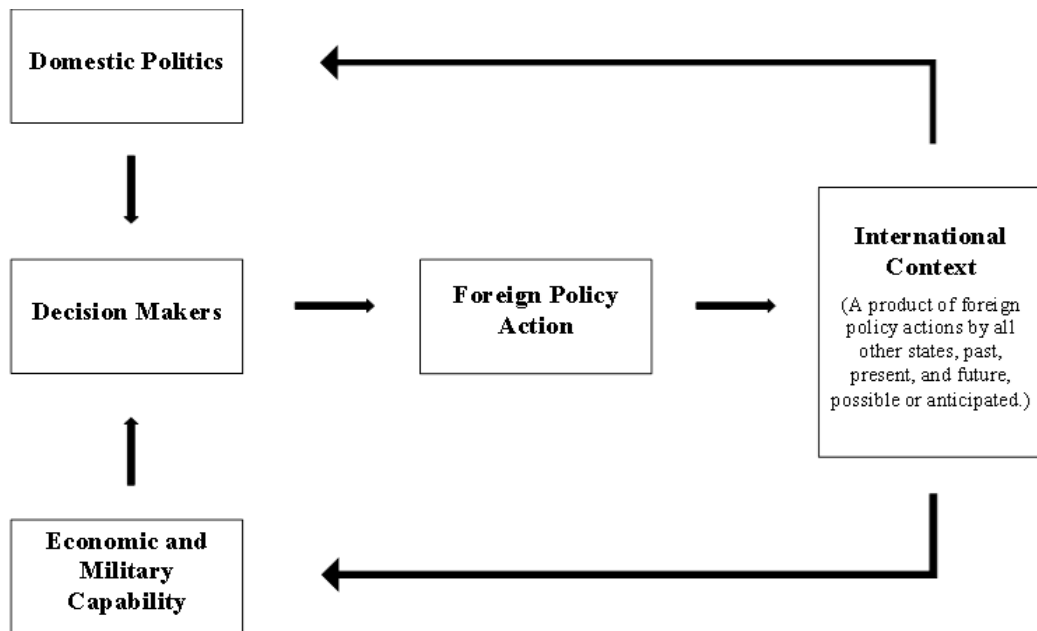
1.7 Kerangka Pemikiran

Teori *decision making*, atau biasa dikenal dengan teori pembuatan keputusan, biasa dikenal sebagai sebuah teori yang berpendapat tentang pembuatan suatu keputusan yang digunakan oleh suatu pemerintah sebagai fondasi untuk membuat kebijakan di suatu negara yang diaturnya.

Teori ini digunakan sebagai acuan para *decision makers* dalam melakukan pembuatan suatu kebijakan yang akan digunakan oleh kepentingan banyak pihak termasuk didalamnya untuk mengakomodasi kegiatan konflik politik global atas banyak pihak agar masyarakat yang menempati negara tersebut merasakan ketenangan dan kedamaian. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori *Foreign Policy Decision-Making* dari William D Coplin didalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics; A theoretical overview*.

Menurut William D Coplin, pengambilan keputusan suatu aktor negara dideterminasi oleh beberapa faktor yang sangat krusial dalam menentukan suatu kebijakan di suatu negara di berbagai situasi politik domestik maupun politik internasional. Selain itu, teori dari William D. Coplin ini juga merumuskan tentang proses dari konsep pembuatan keputusan sebelum akhirnya memproduksi suatu kebijakan politik luar negeri yang bisa diterima oleh masyarakat didalamnya dan bisa dijadikan oleh suatu negara untuk bertindak atas kepentingannya masing-masing, *“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers states. The second is economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system.”* (Coplin, 1971). Pernyataan diatas disampaikan oleh William D Coplin yang mempunyai maksud bahwa pondasi utama aktor negara dalam membuat kebijakan dilandasi atas beberapa faktor:

1. *Domestic Politics* atau situasi politik domestik yang terjadi di negara tersebut
2. *Economy and Military Capability* / Kekuatan militer dan ekonomi dari satu negara yang bersangkutan
3. *International Context*



Tabel 1.1

Sumber: *William D. Coplin, Introduction to International Politics; A theoretical overview, Markham Publishing Co., Chicago, 1971, hal. 26-1.*

Di dalam *Tabel* tersebut terdapat variabel dari berbagai faktor yang mempengaruhi negara sebagai aktor dalam menentukan kebijakannya. Terdapat 3 faktor utama yaitu:

1. Domestic Politics

Dalam hal ini, Coplin ingin menjelaskan bahwa kondisi internal suatu negara, seperti sistem pemerintahan, budaya internal negara dan pendapat partai politik negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari kebijakan luar negeri suatu negara.

Sebagaimana diketahui, politik dalam negeri mencakup beberapa faktor budaya yang secara signifikan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan kondisi politik domestik yang ada, sekalipun negara merupakan aktor ketika membuat kebijakan, tetapi tindakan atau reaksi yang bertanggung

jawab adalah individualistik atau perorangan, kondisi tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang ada atau akan dibuat. Coplin juga menjelaskan bahwa terdapat aktor-aktor politik yang mempunyai peran penting dalam terbentuknya suatu kebijakan luar negeri yang disebut di bukunya sebagai *Policy Influencer*. (Coplin, 1971).

Coplin menggolongkan *Policy Influencer* menjadi empat jenis:

A. *Bureaucratic Influencer*

Aktor ini dijelaskan oleh Coplin sebagai aktor yang mempunyai power yang sangat kuat hingga dia bisa mempengaruhi suatu negara dalam membuat suatu kebijakan luar negeri, aktor ini memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan karena mereka yang mempunyai hubungan politik langsung dengan para masyarakat dengan memberikan informasi langsung kepada mereka, aktor yang mempunyai power ini adalah para individu & organisasi dalam badan eksekutif dari suatu negara.

B. *Partisan Influencer*

Di Dalam bukunya, Coplin menjelaskan bahwa Aktor ini adalah aktor yang berpartisipasi dalam membantu berjalannya kampanye para elit politik dalam mempersiapkan pembuatan kebijakan.

C. *Interest Influencer*

Coplin menjelaskan bahwa Aktor ini adalah aktor yang mempunyai ketertarikan terhadap kebijakan luar negeri yang akan dirumuskan dengan bermodalkan kepentingan dan tujuan yang

sama, aktor ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Tetapi hal yang membedakan *Interest Influencer* dan *Partisan Influencer* adalah *Interest Influencer* tidak mempunyai *power* sekuat *Partisan Influencer*. Maka dari itu, *Interest Influencer* hanya dapat memberikan dukungan suara saja.

D. *Mass Influencer*

Terakhir, Coplin menjelaskan di bukunya, bahwa *Mass Influencer* adalah pendapat dari publik itu sendiri atau bisa dikenal dengan masyarakat biasa. Dalam pembuatan suatu kebijakan, pendapat publik juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam terbentuknya suatu kebijakan dari negara itu sendiri, tetapi hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh sistem politik yang berbeda-beda di setiap negaranya, pada sistem politik tertutup, *Mass Influencer* akan secara bebas berpegang kepada keputusannya sendiri sedangkan di sistem politik terbuka, *Mass Influencer* akan mengikuti apapun yang akan disuarakan oleh pembuat keputusan (Coplin, 1971).

2. *Economy and Military power*. Variabel ini dijelaskan Coplin dalam bukunya dengan maksud bahwa *power* atau kekuatan dari sebuah ekonomi dan militer merupakan salah satu faktor penunjang dari terbentuknya suatu kebijakan di negara. Coplin menerangkan instrumen ini memiliki karakteristik dari tiap jenis negara yang berbeda di dunia, pada negara berkembang, karakteristik tersebut meliputi:

A. Pendapatan nasional yang rendah

- B. Perekonomiannya masih bergantung kepada negara lain untuk barang-barang yang diproduksi, pasar dan juga modal
- C. Mengalami permasalahan di bidang neraca pembayaran karena tingkat ekspor yang rendah sehingga tidak bisa memberikan hasil yang signifikan dari permintaan investor
- D. Tidak memiliki kekuatan tentara yang memadai

Sedangkan karakteristik yang dimiliki negara maju dalam konteks *Economy & power* meliputi:

- A. Pendapatan nasional yang terbilang tinggi
- B. Memiliki kemandirian dalam memproduksi barang dan mempunyai pasar dan modal yang juga bisa berdiri sendiri
- C. Negara maju sangat berperan dalam kegiatan ekonomi politik internasional seperti perdagangan internasional sehingga tidak memiliki masalah yang signifikan untuk menerima investor yang akan masuk
- D. Memiliki kekuatan militer yang sangat baik dan memadai sehingga bisa bersaing secara tingkatan global

Dari 4 poin perbandingan tersebut telah terjadi ketimpangan yang signifikan dalam tingkatan kekuatan dari masing-masing instrumen, *Economy & power*, sehingga negara berkembang lebih sulit merumuskan kebijakan luar negeri mereka.

3. Terakhir, Coplin menjelaskan dalam bukunya bahwa konteks internasional juga merupakan faktor penting untuk sebuah negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Coplin membagi konteks internasional menjadi 3 bagian pokok:

1. Geografis
2. Ekonomi
3. Situasi Politik

Dengan 3 pertimbangan tersebut, sebuah negara dapat merumuskan kebijakan luar negerinya dengan baik

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini adalah metode yang berfokus pada penjabaran data analisis yang dilakukan melalui metode naratif.

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan melakukan proses pengumpulan data dari Internet dan sumber-sumber yang ada di dalamnya antara lain: *E-book*, *Website* pemerintah dan beberapa situs literatur seperti Jurnal dan Skripsi dari peneliti sebelumnya. Beberapa media-media berita juga digunakan oleh penulis dalam proses pengumpulan data baik media cetak atau media online yang tertera di Internet di situs-situs berita yang kredibel dan dapat dipastikan keasliannya. Semua sumber tersebut dijadikan sebagai acuan baca oleh penulis untuk menulis penelitian ini.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintahan negara Pakistan dan objek dari penelitian ini adalah isu Islamofobia terhadap kestabilan ekonomi dan politik negara Pakistan di era Imran Khan. Penelitian ini lebih berfokus pada pemerintahan negara Pakistan di era Imran Khan saja. Pembahasan tentang pemerintahan sebelum dan sesudahnya akan dipaparkan jika dibutuhkan dalam memenuhi sebuah kalimat agar lebih masuk akal.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dijalankan dengan metode sekunder dimana data yang diambil penulis merupakan data yang sudah ada di Internet, seperti *E-book*, Jurnal para Ahli, Penelitian sebelumnya dan Website Pemerintah, kurang lebih sumber yang digunakan adalah seperti yang telah disebutkan kemungkinan akan ada sumber lain seperti artikel media massa online maupun offline untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisannya.

1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan sepenuhnya secara daring melalui media teknologi seperti Laptop, *Smartphone* Android dan Internet. Berbagai sumber sekunder Data tersebut kemudian dikoleksi untuk dijadikan tulisan oleh penulis dalam membantu dalam penulisan penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan akan dimulai dengan bab 1 dimana bab tersebut berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian dan metode penelitian.

Tulisan akan dilanjutkan dengan Bab 2 yang berisikan tentang prinsip dasar kebijakan luar negeri negara Pakistan serta kebijakan luar negerinya dan juga definisi Islamofobia dalam politik global.

Lalu, Bab 3 akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kebijakan dan latar belakang yang dilakukan oleh Imran Khan dalam mengatasi permasalahan Islamofobia terhadap politik ekonomi Pakistan. Seperti, dalam pertanyaan “Mengapa Imran Khan menerapkan kebijakan untuk melawan Islamofobia?”, penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan menuangkannya dalam tulisan ini secara detail, padat dan tidak bertele-tele.

Terakhir adalah Bab 4, bab tersebut berisikan tentang penutupan dan kesimpulan mengenai rumusan masalah yang sudah ditanyakan yaitu “Mengapa imran khan menerapkan kebijakan melawan islamofobia dalam politik luar negeri Pakistan?”. Penulis berharap agar dapat menjawab dan menjelaskan secara jelas, singkat, tidak terlalu bertele-tele terhadap rumusan masalah yang sudah ditanyakan di penelitian ini.

Terakhir adalah daftar pustaka, dimana sumber-sumber yang sudah digunakan oleh penulis dalam membantu penulisan penelitian akan dicantumkan secara akademik dan jelas

BAB 2

Kebijakan luar negeri Pakistan di era Imran Khan

2.1. Prinsip Kebijakan Luar Negeri Pakistan Sebelum Imran Khan

Pada sub-bab ini penulis telah mencoba menganalisis mengenai prinsip kebijakan luar negeri negara Pakistan dan menemukan beberapa hasil analisis mengenai gambaran umum dari kebijakan luar negeri negara Pakistan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai komparasi secara umum dari kebijakan luar negeri negara Pakistan dari sebelum Imran Khan menjabat dan setelah Imran Khan menjabat sebagai perdana menteri Pakistan. Dimana jawaban tersebut kemudian akan diolah kembali untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah disampaikan yaitu Mengapa Imran Khan menerapkan kebijakan yang melawan Islamofobia dalam politik luar negeri Pakistan.

Setiap negara memiliki kebijakan politik mereka sendiri guna memperkuat dinamika politik mereka secara domestik maupun internasional. (Binus University 2022).

Secara singkat, pada awalnya, Pakistan merupakan sebuah negara yang menyatu dengan India, sebelum mereka merdeka, Pakistan dan India merupakan satu negara yang berdiri di kawasan yang satu di atas jajahan dari negara Inggris Raya atau waktu itu biasa dikenal dengan Imperium Britania Raya. Sebagai anak dari benua India, Pakistan tentunya tidak memiliki pemerintahan dan kebijakannya sendiri. Seperti yang sudah diketahui Pakistan sebelumnya hanyalah sebuah negara kecil yang dijajah oleh Inggris di benua India yang pada akhirnya memerdekakan diri pada tahun 14 Agustus 1947. (GANA ISLAMIKA 2019).

Pakistan menerapkan prinsip kebijakan luar negeri damai dan stabil. Pakistan mempunyai prinsip kebijakan luar negeri dimana kedamaian dan kestabilan merupakan sesuatu yang harus ditempatkan diatas prioritas lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan resmi di salah satu website kedutaan pemerintahan negara Pakistan bahwa salah satu kebijakan luar negerinya adalah "*Peace with in and peace without*" yang berarti Pakistan ingin menciptakan hubungan pertemanan yang baik kepada negara-negara tetangga yang ada di ruang lingkup masyarakat global secara damai dan ramah. Pakistan ingin menciptakan hubungan luar negeri yang baik kepada seluruh negara yang ada di ruang lingkup global terutama kepada negara dengan kekuatan yang besar agar bisa menciptakan hubungan diplomasi yang saling menguntungkan satu sama lain, selain itu, Pakistan juga ingin berfokus kepada pembangunan hubungan luar negeri dengan negara tetangga yang ada disekitar Pakistan seperti salah satunya India dan Afganistan dimana Pakistan dan India mempunyai latar belakang hubungan diplomasi yang buruk. (Embassy of Islamic Republic of Pakistan. Athens, Greece. t.t.)

Selain itu, Kebijakan luar negeri Pakistan juga bertujuan untuk menciptakan pandangan positif terhadap ruang lingkup global, kebijakan Pakistan memuat tentang bagaimana Pakistan ingin menciptakan *image* sebagai negara Islam yang demokratis, moderat, progresif dan dinamis. Salah satu usaha Pakistan adalah dengan bekerjasama secara ekonomi kepada negara di komunitas internasional dan siap berkontribusi besar terhadap isu-isu keamanan politik yang berpotensi mengancam keamanan politik luar negeri Pakistan. (Ministry Of Foreign Affairs. Government Of Pakistan, t.t)

Kebijakan luar negeri Pakistan juga mencakup hubungan internasional dengan negara muslim lain. Pakistan berusaha membangun hubungan diplomasi yang erat dengan negara-negara yang mempunyai muslim didalamnya, seperti muslim yang ada di Afrika, Amerika Latin dan Asia.

Tujuan dari kebijakan ini antara lain untuk:

1. Membangun keamanan internasional dan perdamaian internasional
2. Saling memberikan kebaikan terhadap satu sama lain seperti jika ada rakyat muslimnya yang membutuhkan bahan pangan atau kebutuhan pokok lainnya
3. Membuat hubungan diplomasi dengan negara muslim tetangga hingga membentuk *Islamic Unity*
4. Dengan *Islamic Unity* Pakistan ingin menghilangkan stigma negatif mengenai muslim dan Islam terhadap masyarakat global yang beragama non-muslim

Dalam tujuannya membangun citra negara yang damai, Pakistan menggunakan kebijakan luar negerinya untuk berperan dalam kegiatan politik luar negeri. Prinsip dasar tersebut juga mempunyai visi dan misi untuk membangun kestabilan hubungan luar negeri dan perekonomian Pakistan itu sendiri. (Ministry Of Foreign Affairs. Government Of Pakistan, t.t.)

2.2. Kebijakan Luar Negeri Imran Khan Terhadap Isu Islamofobia

Pada saat kemenangannya pada 11 Juli 2018, Khan berjanji kepada negara Pakistan untuk melakukan reformasi birokrasi besar-besaran untuk melakukan rekonstruksi ulang sistem pemerintahan Pakistan yang sebelumnya kurang tepat di

mata Khan. Pada tanggal 26 Juli, sesaat setelah kemenangannya, Imran Khan menyampaikan dalam pidatonya bahwa Ia ingin membuat Pakistan baru, Khan menyebutkan beberapa isu-isu yang ada di Pakistan seperti korupsi-korupsi yang masih tinggi jumlahnya akan ditindak dengan tegas, Khan juga menyampaikan jika perekonomian Pakistan di era pemerintahannya akan lebih baik, Khan tentu tidak lupa juga dengan isu-isu besar seperti keamanan politik negara Pakistan dan meningkatkan hubungan luar negerinya terhadap masyarakat global. (Shams 2018; Dikarma and Yolanda 2018)

Pada saat pertama kali menjabat sebagai perdana menteri, Imran Khan telah menggarisbawahi apa saja yang sedang menjadi masalah di negara Pakistan. Menurut Imran Khan, Pada tahun 2018, Pakistan, sedang mengalami krisis perekonomian yang sangat besar jumlahnya hingga mata uang Rupee negara Pakistan jatuh hingga 5% nilainya dan hampir menyentuh rekor terendah dalam sejarah perekonomian Pakistan. Dalam pidatonya di 26 Juli 2018 yang diunggah di situs *Youtube* oleh Dawn News, Khan menjelaskan dalam pidatonya tentang bagaimana arah yang akan dilaluinya pada saat menjabat nanti, Khan, menggarisbawahi bahwa perekonomian Pakistan pada saat itu sangatlah buruk dan butuh tindakan yang serius. Lalu, Imran Khan menjelaskan mengenai beberapa solusi yang mungkin dapat mengatasi isu perekonomian tersebut. Khan, menjelaskan dalam pidatonya, bahwa isu perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kemakmuran masyarakat. (Farras and CNBC Indonesia 2018).

Imran Khan dikenal sebagai aktor politik yang sangat menjunjung tinggi nilai agama Islam. Imran Khan merupakan muslim yang taat, Khan

memperpadukan kepercayaan agamanya dengan ideologi politiknya dalam membangun “Pakistan Baru” di era reformasi birokrasi yang Khan janjikan, Imran Khan salah satu aktor politik yang mendukung Islam dengan hidupnya. (Hashim 2020)

Pada saat era pemerintahan Imran Khan pada tahun 2018, isu global Islamofobia sedang naik tinggi, terlebih di Eropa dan Amerika Serikat hingga Australia dan Oceania, dimana Amerika Serikat merupakan negara dengan propaganda Islamofobia pertama sejak peristiwa 9/11. Pada tahun 2019, di benua Oceania, terdapat sebuah peristiwa Islamofobia dalam bentuk penembakan terror terhadap 2 masjid yang berbeda di negara New Zealand. Isu tersebut telah menewaskan setidaknya 51 orang didalamnya. Peristiwa yang terjadi pada 15 Maret 2019 ini telah menimbulkan respon internasional yang cukup tinggi, terlebih dari negara yang mempunyai umat muslim didalamnya seperti Pakistan. Imran Khan melihat kasus ini sebagai tindakan yang jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi Pakistan dan umat muslim lainnya, terlebih jika melihat isu tersebut dari pespektif keamanan manusia. Sebagai salah satu aktor politik yang peduli terhadap isu Islamofobia, Imran Khan berniat untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan isu ini dengan harapan selain dapat meningkatkan kepedulian masyarakat internasional mengenai isu Islamofobia, kebijakan luar negeri tersebut juga diharapkan dapat menyelesaikan kasus Islamofobia yang tidak ada habisnya.

2.3. Definisi Islamofobia Secara Umum

Islamofobia adalah fenomena sosial dalam *level* global yang mengacu kepada sikap dan tindakan diskriminatif terhadap Islam dan umat muslim di seluruh dunia. Istilah Islamofobia pertama kali dikenal oleh masyarakat dunia pada tahun 1980-an tetapi baru mendapatkan perhatian dari masyarakat global setelah terjadinya peristiwa serangan 11 September di Amerika Serikat. (Tyrer 2013, 32)

Fenomena Islamofobia mengacu kepada tindakan diskriminatif kepada segala jenis kelompok umat muslim di dunia, termasuk individualitas, kelompok etnis, suku, budaya bahkan tingkat negara. Tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada umat muslim ini tidak hanya dilakukan secara verbal, kekerasan fisik dan pengucilan diri terhadap orang muslim di kelompok sosial tersebut juga dilakukan dalam fenomena ini. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017)

Islamofobia juga bisa merujuk kepada peristiwa yang bersifat stereotip terhadap tindakan apapun yang dilakukan oleh umat Islam. Tindakan ini bisa terjadi di kehidupan berpolitik maupun sosial, stereotip ini menganggap bahwa tindakan apapun yang dilakukan oleh umat Islam adalah hal yang salah- dan terkait kepada tindakan terorisme. Bahkan, dengan melihat apa yang sudah terjadi, serangan teroris seperti serangan ISIS yang mengatasnamakan Islam sebagai fundamentalnya sering dikaitkan kepada umat Islam secara umum. Prasangka buruk ini juga didukung oleh beberapa media berita internasional yang ada di Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini yang merupakan salah satu faktor utama dalam penyebaran fenomena sosial yang mendiskriminasi seluruh umat Islam di dunia. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017).

Islamofobia merupakan isu global yang kompleks dimana tindakan tersebut bisa digolongkan kedalam satu wadah yang berisikan kondisi dan situasi yang berbeda. Tolak ukur ini bisa dihitung mulai dari kekerasan verbal terhadap umat Islam, kekerasan fisik hingga diskriminasi kepada umat muslim atas hak asasi manusia mereka dalam kegiatan politik seperti dikucilkan terhadap kehidupan sosial sehari-hari. (Ernst 2013, 2)

Sikap yang bisa digolongkan sebagai Islamofobia antara lain adalah:

1. Stereotip

Stereotip terhadap umat muslim merupakan salah satu sikap Islamofobia. Masyarakat global memberikan stigma buruk terhadap agama Islam. Stigma buruk ini bisa berbentuk seperti menciptakan pandangan publik bahwa Islam adalah agama yang ketinggalan jaman, opressif, dan selalu mempunyai prinsip yang ekstremis. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017, 24).

2. Ujaran Kebencian

Tindakan yang tergolong kekerasan verbal ini juga bisa digolongkan kepada sikap Islamofobia. Tindakan dapat berbentuk seperti

- a. Hinaan terhadap umat Islam
- b. Menggolongkan semua umat Islam sebagai teroris
- c. Selalu mengaitkan semua tindakan yang dilakukan oleh umat Islam sebagai tindakan kekerasan. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017, 35)

3. Diskriminasi dan Pengucilan

Islamofobia juga bisa mengarah kedalam tindakan diskriminasi dan pengucilan terhadap semua umat muslim dari kegiatan sosial dan politik dalam ruang lingkup masyarakat mereka. Salah satu contohnya adalah tidak diberikannya keadilan dalam dunia kerja. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017).

4. Kekerasan Fisik dan Tindakan Kriminal

Sikap Islamofobia salah satunya juga bisa memunculkan tindakan yang mengancam fisik umat muslim hingga kriminalitas yang akan dilakukan terhadap umat muslim. Tindakan ini bisa bervariasi, mulai dari dibakarnya masjid, pemukulan tanpa alasan terhadap umat muslim hingga pembunuhan berencana. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017, 10)

5. Gambaran Buruk di Media Internasional

Islamofobia juga menyebabkan stigma buruk terhadap agama Islam secara keseluruhan. Media internasional dapat menggambarkan umat Islam sebagai agama teroris tanpa memikirkan sisi positif dari agama Islam itu sendiri. Hal ini menyebabkan meluasnya stigma buruk tersebut kedalam semua golongan masyarakat global. (All Party Parliamentary Group on British Muslims, 2017, 16)

BAB 3

Faktor-faktor yang mempengaruhi Imran Khan dalam melakukan Pembuatan Kebijakan Anti-Islamofobia di Politik Internasional

3.1. Faktor Politik Domestik

Berdasarkan teori *Decision Making* dari William D. Coplin, *Decision Makers* atau para aktor yang menjadi pelaku pembuatan kebijakan menggunakan beberapa faktor yang dijadikan dorongan dalam membuat keputusan. Salah satu faktor tersebut adalah faktor politik domestik. Faktor politik domestik dapat dijabarkan menjadi artian kondisi politik internal yang terjadi di suatu negara tersebut, hal ini juga mencakup seperti pendapat partai oposisi lain, sistem pemerintahan dan yang terpenting adalah perilaku dan kondisi masyarakat internalnya itu sendiri. Tidak hanya itu, para *Decision Makers* juga mempertimbangkan pengambilan keputusannya melalui beberapa “*Influencer*” atau “Pengaruh” ketiga yang dapat secara signifikan mempengaruhi negara sebagai pelaku dari pembuatan keputusan. “Pengaruh” ketiga tersebut berdasarkan teori William D. Coplin bernama *Policy Influencer*. (Coplin, 1971)

Coplin sendiri menggolongkan *Policy Influencer* kedalam 4 jenis:

1. *Bureaucratic Influencer*
2. *Partisan Influencer*
3. *Interest Influencer*
4. *Mass Influencer*

Jika berdasarkan teori tersebut, maka hasil analisis yang didapatkan adalah Perdana Menteri merupakan aktor politik yang termasuk kedalam *Bureaucratic Influencer*, karena berdasarkan teori William D. Coplin, *Bureaucratic Influencer*

merupakan aktor yang mempunyai kekuatan tertinggi dari pemerintahan suatu negara, jika digabungkan kedalam kasus penelitian ini, maka hasil analisis penelitian mengatakan pemerintahan negara Pakistan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Hal ini dibuktikan dengan sejarah negara Pakistan itu sendiri dimana semenjak kemerdekaanya, Pakistan telah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan Gubernur Jendral. Menurut website pemerintahan negara Pakistan yang berjudul *National Assembly of Pakistan*, Perdana Menteri pertama negara Pakistan adalah Liaqat Ali Khan.

Pada analisis kali ini, penulis menemukan hipotesis yang mengatakan bahwa Imran Khan membuat kebijakan luar negerinya mengenai isu Islamofobia berdasarkan faktor politik domestik ini dimana dia sendiri yang merupakan aktor terkuat di pemerintahan negara Pakistan setelah peresmiannya sebagai Perdana Menteri di tahun 2018. (Shams, 2019)

Penulis dalam analisisnya juga menemukan bahwa pada saat pemilihan umum 2018 di negara Pakistan dimana Imran Khan bersama dengan partai politik *Pakistan Tehrek-e-Insaf* memenangkan suara, terdapat beberapa partai oposisi yang tidak satu pikiran dengan hasil suara yang terkumpul, Partai oposisi *All Parties Conference (APC)*, *Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)* dan *Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F)* berpendapat bahwa terdapat kemungkinan bahwa Imran Khan merasa diuntungkan oleh pihak militer yang intervensi dengan mendukung partai politik dari Imran Khan. Pihak oposisi tersebut menganggap pemilu pada tahun tersebut merupakan pemilihan umum terkotor sepanjang sejarah Pakistan, dimana pada saat itu pihak oposisi menginginkan pemilihan ulang. (Shams, 2019)

Berdasarkan hasil analisis tersebut, partai oposisi *All Parties Conference* (APC), *Pakistan Muslim League-Nawaz* (PML-N) dan *Jamiat Ulema-e-Islam* (JUI-F) termasuk kedalam kategori *Partisan Influencer*. *Partisan Influencer* sendiri dapat diartikan sebagai aktor politik yang terlibat pada saat kegiatan politik tersebut berlangsung. (Shams, 2019)

Jika analisis tersebut digabungkan dengan konseptual teori yang digunakan maka akan muncul hasil analisis baru bahwa Imran Khan sebagai *Decision Makers* membuat keputusannya dalam pembuatan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap isu Islamofobia berdasarkan ketidaksetujuan tersebut. Penulis juga telah berusaha menganalisis dan menemukan hasil analisis yang mengatakan bahwa Imran Khan berniat untuk memperkuat *Image* politik domestiknya dalam pemerintahan Pakistan sebagai Perdana Menteri yang bisa diandalkan kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, faktor tersebut yang mungkin dijadikan alasan utama mengapa Imran Khan mengeluarkan kebijakan Anti-Islamofobia dalam politik global.

3.1.1 Politik Internasional sebagai Penguatan Legitimasi Imran Khan dalam Pemerintahan Negara Pakistan

Jika melihat dari latar belakang Imran Khan pada saat pemilihan umum 2018, Imran Khan dinilai tidak melakukan pemilihan umum yang bersih, karena pada saat itu, telah diduga bahwa Imran Khan merasa diuntungkan oleh pihak Militer yang melakukan intervensi dengan mendukung Imran Khan pada saat pemilu 2018. Skenario terburuk dari dugaan tersebut adalah pihak militer

mendukung Imran Khan karena dengan adanya niat ingin menguasai kekuasaan pemerintahan Pakistan kembali.

Atas dasar tersebut, pada saat pemilihan umum 2018, terdapat beberapa partai oposisi yang tidak setuju dengan hasil suara akhir yang telah dihasilkan karena dinilai sebagai pemilu yang kotor. Pihak oposisi lalu ingin mengadakan adanya pemilihan ulang. Berdasarkan peristiwa tersebut Imran Khan merespon bahwa dirinya tidak akan takut dan siap untuk dilakukan penyelidikan jika memang hal tersebut terjadi.

Dengan melihat situasi politik domestik yang kurang baik, Imran Khan telah berusaha meningkatkan legitimasinya sebagai pemimpin negara Pakistan dengan cara melihat kedalam jendela yang lebih sempit. Imran Khan melihat isu yang mungkin bisa dijadikan instrumen pembantunya dalam meningkatkan legitimasi kepemimpinannya di negara Pakistan Pada tahun 2018, semenjak Imran Khan menjabat menjadi Perdana Menteri negara Paksitan, isu global Islamofobia tidaklah kunjung surut sejak peristiwa awal kemunculannya pasca peristiwa 9/11.

Isu Islamofobia meningkat pesat pada tahun 2019 dimana telah terjadi kasus penembakan yang dialami oleh salah satu umat muslim di New Zealand yang menewaskan setidaknya 51 orang didalam 2 masjid yang berbeda. Peristiwa terror ini disebabkan oleh pelaku yang terduga merupakan ekstremis agama Kristen dari negara Australia yang bernama Brenton Tarrant. Uniknya, Brendan Tarrant menyiarkan penembakan tersebut secara langsung melalui media sosial *Facebook* miliknya dengan gaya kamera *First-person*.

Melihat peristiwa tersebut, pada tahun yang sama di bulan September, tepatnya kurang lebih 6 bulan setelah peristiwa penembakan *Christchurch* di New

Zaeland yang terjadi pada 15 Maret membuat Imran Khan mengusulkan kebijakan luar negeri berbentuk hari internasional untuk melawan isu Islamofobia yang telah meledak beberapa tahun terakhir. Imran Khan ingin menciptakan kedamaian dan keamanan atas dasar seluruh umat muslim di dunia dengan mengusulkan kepada PBB untuk menyetujui hari internasional 15 Maret untuk melawan Islamofobia, karena menurut Imran Khan peristiwa *Christchurch* sangat pantas untuk dijadikan landasan perencanaan hari internasional untuk melawan Islamofobia. Imran Khan juga berpendapat bahwa tindakan terorisme bisa terjadi bukan hanya dari muslim saja, maka dari itu, Imran Khan menganggap adanya ketidakadilan dimana hanya umat muslim saja yang dianggap sebagai teroris hanya berdasarkan peristiwa 9/11 tetapi tidak dengan peristiwa 15 Maret *Christchurch*.

Imran Khan menggunakan cara tersebut agar lebih dipandang sebagai seorang pemimpin yang bisa diandalkan kepemimpinannya.

3.2. Faktor Ekonomi

Jika mengacu pada teori William D. Coplin mengenai *Decision Making*, maka akan muncul analisis yang mengatakan bahwa *Decision Makers* atau aktor pembuat kebijakan akan menggunakan pertimbangan dari beberapa faktor antara lain faktor domestik, faktor ekonomi dan faktor militer. Setelah sebelumnya penulis sudah menganalisis mengenai bagaimana faktor domestik mempengaruhi Imran Khan dalam melakukan pembuatan kebijakan Anti-Islamofobia, Penulis juga telah menganalisis faktor lainnya yaitu faktor ekonomi dan militer. (Coplin, 1971)

Seperti yang diketahui, negara Pakistan merupakan negara dengan perekonomian yang tergolong buruk. Sebagai negara berkembang di Asia Selatan, Pakistan mengalami beberapa krisis neraca pembayaran, salah satunya ada di tahun 2018 dimana nilai mata uang Rupee merosot hingga 5% rekor terendah mereka. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kegiatan eksor & impor yang sangat lesu oleh negara Pakistan, pada akhirnya Pakistan mengalami kekurangan mata uang dolar cadangan mereka. (Farras 2018)

Kondisi ini menyebabkan Imran Khan sendiri untuk menangani hal itu. Pertama, Imran Khan menggarisbawahi beberapa permasalahan ekonomi yang menyebabkan penurunan drastis ini, mulai dari kurangnya aktivitas pada bidang ekspor dan impor yang terlalu berlebihan. Imran Khan menyatakan agar Pakistan memperbaiki dan mengurangi kegiatan impor negara agar menghemat cadangan dolar yang tersedia. Imran Khan mengatakan secara spesifik bahwa problematika dari kegiatan impornya dapat diatasi jika negara mengurangi kegiatan impor mobil, smartphome, keju dan buah. Hal ini karena Imran Khan menganggap bahwa impor keju dari negara lain telah menghabiskan dana anggaran dolar negara. Lalu hal ini juga akan menghasilkan penurunan perekonomian dari negara Pakistan itu sendiri, karena pasar domestik Pakistan telah dipenuhi oleh keju impor saja. Hasil analisis penulis juga menemukan bahwa Imran Khan mengatakan bahwa Pakistan tidak pantas jika selalu melakukan impor barang dari negara lain karena tidak memiliki cadangan mata uang asing yang lebih.

Selain itu, kondisi perekonomian negara Pakistan juga telah berketergantungan terhadap dana yang diberikan oleh *International Monetary Fund*. Dimana hasil analisis pada sub-bab ini menemukan bahwa Imran Khan

tidak begitu menyetujui tindakan tersebut karena akan memicu ketergantungan yang lebih lagi. Imran Khan juga telah memikirkan solusi lain dengan mengadakan kerjasama ekonomi luar negeri dengan negara yang dianggap sahabat oleh Pakistan yaitu China dan Arab.

Sedangkan kondisis

3.2.1. Kerjasama Ekonomi dengan Negara Islam untuk Memperkuat Ekonomi Pakistan

Sejak periode awal masa pemerintahannya, Imran Khan, sudah menggarisbawahi isu perekonomian yang telah menjadi permasalahan utama dari negara Pakistan pada saat itu. Dimana salah satunya pada tahun 2018, Pakistan telah mengalami krisis moneter yang sangat tinggi angkanya, sehingga menyebabkan nilai Rupee Pakistan pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 5% dibawah sejarah keuangan Pakistan. Atas dasar itu, Imran Khan mengeluarkan sebuah kebijakan luar negerinya mengenai kerjasama ekonomi dengan negara lain. Imran Khan berpendapat bahwa dirinya ingin menjalankan sebuah kerjasama ekonomi dengan negara lain yang tergolong mandiri dalam segi ekonominya seperti Tiongkok, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Imran Khan juga mempunyai pikiran untuk bekerjasama dengan negara Islam lainnya agar hubungan luar negerinya terhadap negara Islam menjadi lebih baik. Kerjasama ekonomi ini dijadikan oleh Imran Khan sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi di negara Pakistan pada saat itu. Aktor negara dalam kerjasama tersebut mencakup antara lain:

1. Arab Saudi
2. Malaysia

3. Turki

Upaya yang dilakukan Imran Khan salah satunya dengan mengajukan bantuan dana kepada Arab Saudi. Arab Saudi dijuluki sebagai “Negara Sahabat” oleh Pakistan berdasarkan historisnya yang cukup baik antara satu sama lain. Pada bulan September tahun 2018, Imran Khan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Arab Saudi. Pada saat itu, upaya Imran Khan tidak menghasilkan hasil yang signifikan, karena, Arab Saudi menolak pengajuan dana bantuan yang telah diajukan oleh Imran Khan. (CNN Indonesia 2018)

Lalu, 1 bulan setelahnya, Imran Khan melakukan kegiatan politik luar negeri yang sama dengan mengunjungi Arab Saudi kembali dan mengajukan permohonan bantuan dana kembali. Pada bulan Oktober 2018, 1 bulan tepat sejak kegagalan kunjungan terakhirnya, Imran Khan berhasil mendapatkan dana bantuan dari Arab Saudi sebesar USD\$ 3 Miliar dolar Amerika Serikat. Persetujuan tersebut diharapkan oleh Imran Khan agar dapat menghasilkan hasil yang signifikan berupa penutupan krisis neraca pembayaran yang dialami negara Pakistan pada saat itu. (CNN Indonesia 2018)

Hubungan luar negeri Pakistan dengan Arab Saudi tercatat memang sangat baik, terlebih dalam sektor kerjasama ekonominya. Hal ini dapat ditinjau dari peristiwa bantuan dana yang sudah berhasil dilakukan oleh negara Pakistan terhadap Arab Saudi sebesar USD\$ 3 Miliar dolar Amerika Serikat sebagai upaya Imran Khan dalam memerangi krisis perekonomian Pakistan. (CNN Indonesia 2018)

Pada tahun 2022, Pakistan kembali mengajukan dana bantuan kembali kepada Arab Saudi guna memerangi isu krisis ekonomi negara Pakistan yang

tidak kunjung membaik itu. Hal ini juga didukung oleh peristiwa banjir besar yang dialami oleh negara Pakistan, banjir tersebut membuat negara Pakistan merasakan kerugian yang mencapai hingga USD 30\$ Miliar dolar. (Shahzad 2022)

3. 3. Konteks Internasional

Jika membiacarakan mengenai konteks internasional, maka tidak akan jauh dari faktor geografis, ekonomi dan situasi politik. Hal ini disebutkan dalam teori William D. Coplin mengenai para *Decision Makers* membuat kebijakan luar negeri mereka. (Coplin, 1971)

Pada sub-bab ini, analisis akan lebih ditekankan kepada kondisi geografis dari negara Pakistan yang mendorong Imran Khan dalam membuat kebijakan luar negerinya mengenai Anti-Islamfobia.

Secara geografis, menurut website pemerintahan Kemlu, Pakistan terbentuk pada tahun 1947 sebagai hasil dari keinginan umat muslim di India yang menginginkan negara mereka (Islam) sendiri. Pada awal terbentuknya, Pakistan terbagi menjadi dua bagian wilayah, Pakistan Barat dan Pakistan Timur sebelum akhirnya Pakistan Timur memilih untuk menjadi negara independen dengan nama Bangladesh pada tahun 1971. Pakistan juga terletak secara geografis di Asia Selatan yang berdekatan dengan Tiongkok, Afghanistan, Iran, India dan Arab. Pakistan mempunyai agama Islam sebagai mayoritasnya dengan angkat kurang lebih 97% dari total penduduknya.

Sebagai Perdana Menteri di negara dengan mayoritas agama Islam, Imran Khan, secara politik menggarisbawahi permasalahan yang sedang terjadi di negara

tetangga yang juga beragama Islam, seperti Afghanistan. Imran Khan berkeinginan untuk menciptakan kondisi yang aman untuk masyarakat Afghanistan yang terkena dampak dari peperangan. Imran Khan menjelaskan bahwa Pakistan akan melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menangani isu tersebut. Dalam analisis penulis, Imran Khan juga tidak lupa untuk menggarisbawahi konflik yang sedang terjadi di Jammu dan Kashmir agar perlu diselesaikan agar menciptakan lingkungan yang damai di negara Asia Selatan.

Konteks Internasional ini yang kemudian penulis gunakan untuk mengetahui alasan mengapa Imran Khan peduli dengan isu Islamofobia yang terjadi secara global.

3.3.1. Anti-Islamofobia di Politik Global sebagai Agenda Politik Bersama

Pada tahun 2019, Imran Khan telah merespon isu penembakan yang terjadi di negara New Zealand. Aksi terorisme yang menyebabkan terbunuhnya 51 orang di dua masjid mengakibatkan respon internasional yang serius, termasuk Imran Khan bersama negara Pakistan yang bermayoritaskan agama Islam.

Pada 15 Maret 2022, UNGA resmi mengadopsi usulan resolusi dari isu Islamofobia yang diberikan oleh Imran Khan sebagai perwakilan umat muslim di dunia. Resolusi tersebut berisikan mengenai dukungan umat muslim terhadap isu Islamofobia yang terjadi secara global. Pemilihan dari 15 Maret itu dipilih oleh Imran Khan berdasarkan dari peristiwa dengan tanggal yang sama, 15 Maret, dimana Brenton Tarrant seorang ekstremis Kristen dari Australia membantai 2 masjid di New Zealand. Peristiwa tersebut telah menewaskan setidaknya 51 orang didalamnya.

Setelah resmi diadaptasi, Imran Khan memberikan ucapan selamat kepada umat Islam melalui media sosial *Twitter* nya bahwa isu yang telah mengkhawatirkan seluruh umat Islam akhirnya dapat diredakan melalui agenda politik bersama tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Imran Khan merupakan seorang aktor politik yang cukup peduli dengan kasus Islamofobia dimana tidak banyak aktor politik yang peduli dengan isu itu. Imran Khan resmi menjadi perdana menteri negara Pakistan pada tahun 2018, dimana pada kurun waktu tersebut dan beberapa tahun setelahnya, Islamofobia menjadi isu yang mengancam keamanan muslim global.

Pada tahun 2019, telah terjadi sebuah aksi terror yang mengakibatkan 2 masjid dan orang-orang didalamnya terbantai secara brutal, dengan data yang tercatat setidaknya 51 orang didalamnya terbunuh didalam isu tersebut. Kepemimpinan perdana menteri Imran Khan yang pada saat itu hanya berumur kurang dari 1 tahun, melihat isu tersebut langsung memberikan tindakan yang responsif.

Dengan mengetahui latar belakang negara Pakistan yang merupakan negara dengan mayoritas Islam, Imran Khan memberikan sebuah agenda politik bersama yang bertujuan untuk mengatasi isu Islamofobia yang telah mengancam keamanan semua umat muslim di dunia. Pada tahun yang sama, 2019, Imran Khan menyuarakan resolusinya kepada majelis umum PBB / UNGA pada saat pertemuan PBB ke 74 di New York dengan meminta majelis umum PBB untuk memberikan peresmian hari 15 Maret sebagai hari untuk memperingati Islamofobia.

Pada saat peresmian pada tahun 2022, Imran Khan lalu memberikan berita baik itu kepada seluruh umat muslim di dunia melalui akun *Twitter* miliknya.

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Imran Khan dapat mempengaruhi legitimasi Imran Khan dalam pemerintahan negara Pakistan. Sebab, pada saat awal pemilihan umum untuk perebutan kursi parlemen, Imran Khan dinilai melakukan kecurangan dalam hasil akhir suara yang dihasilkan. Partai oposisi seperti *All Parties Conference (APC)*, *Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)* dan *Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F)* memberikan pendapatnya kepada pemilu pada tahun itu, mereka menilai bahwa pemilu Pakistan pada tahun 2018 merupakan pemilu dengan adanya intervensi dari pihak militer. Pihak militer juga diduga ingin menguasai negara Pakistan kembali melalui cara dengan memberikan dukungan kepada Imran Khan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri mengenai Anti-Islamofobia yang dibuat Imran Khan dapat membantunya dalam meningkatkan legitimasinya sebagai pemimpin negara Pakistan.

Selain itu, perekonomian negara Pakistan juga tercatat tidak kunjung baik semenjak kemerdekaannya pada tahun 1947. Dimana, kebijakan luar negeri tersebut diharapkan agar mendorong adanya kerjasama ekonomi negara Islam lain dengan Pakistan sehingga negara Islam dapat bebas dari ketergantungan ekonomi seperti contoh suntikan dana dari IMF.

Terakhir yang tidak kalah penting adalah, dengan adanya kebijakan luar negeri Anti-Islamofobia diharapkan agar masyarakat internasional dapat lebih sadar akan pentingnya isu Islamofobia yang sedang terjadi di dunia, seperti contoh masyarakat sipil yang merasakan dampak perang dari Afghanistan.

4.2 Rekomendasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dengan mengolah lebih dalam lagi mengenai isu Islamofobia dengan Pakistan tepatnya dibawah pemerintahan Imran Khan. Penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian mengenai “Dinamika Ekonomi negara Pakistan dalam era Imran Khan dengan studi kasus Islamofobia”.

DAFTAR PUSTAKA

ALJAZEERA. 2022. "Pakistan PM lauds UN for International Day to Combat Islamophobia." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/16/pakistan-pm-lauds-un-for-international-day-to-combat-islamophobia>.

All Party Parliamentary Group on British Muslims. 2017. "ISLAMOPHOBIA DEFINED," The inquiry into a working definition of Islamophobia. 2017. In *Report on the inquiry into A working definition of Islamophobia / anti-Muslim hatred*. N.p.

Arshad, Khusnood, Sulaiman Ahmad, Sanah Waheed, and Islam Badshah. n.d. "POLITICAL DISCOURSE: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE RESISTANCE OF ISLAMOPHOBIC IDEOLOGY IN IMRAN KHAN CONFERENCE TO UNGA." *GLOBAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH* 7 (6): 155-161. 2394-5788.

BINUS UNIVERSITY. n.d. "Foreign Policy; Definisi dan Tujuan yang Wajib Diketahui!" Accessed February 9, 2023. <https://binus.ac.id/2022/04/foreign-policy-definisi-dan-tujuan-yang-wajib-diketahui/>

CNN Indonesia. 2018. "Arab Saudi Tawarkan Bantuan ke Pakistan US\$6 Miliar." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181024025651-532-340902/arab-saudi-tawarkan-bantuan-ke-pakistan-us-6-miliar>.

CNN Indonesia. 2020. "Imran Khan, 'Kapten' Pakistan Pejuang Melawan Islamofobia." CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20200519140334-178-504901/imran-khan-kapten-pakistan-pejuang-melawan-islamofobia>.

Coplin, William D; Harry Suryana; Marbun, Marsedes. Pengantar politik internasional : suatu telaah teoritis / William D. Coplin ; alih bahasa Marsedes Marbun, penyunting Harry Suryana. Bandung :: Sinar Baru,, 1992

D-8 Organization for Economic Cooperation. n.d. "Brief History of D-8 – D-8 Organization for Economic Cooperation." D-8 Organization for Economic Cooperation. Accessed February 26, 2023. <https://developing8.org/about-d-8/brief-history-of-d-8/>.

D-8 Organization for Economic Cooperation. n.d. "Purposes & Objectives – D-8 Organization for Economic Cooperation." D-8 Organization for Economic Cooperation. Accessed February 27, 2023. <https://developing8.org/about-d-8/purposes-objectives/>.

Dawn News. 2018. "Our government will decide what we will do with PM House, Imran Khan," DawnNews headlines, news stories, updates and latest news from Pakistan. Top political news, bulletins, talk shows, infotainment and much more. Subscribe to our channel DawnNews - <https://goo.gl/f6D4OG> <https://youtu.be/Gsaxe7yHjyo>. youtube.com.

DAWN. 2007. "Demo against Karachi blast held - Newspaper - DAWN.COM." *Dawn*, October 21, 2007.
<https://www.dawn.com/news/272061/demo-against-karachi-blast-held>.

Dikarma, Kamran, and Friska Yolanda. 2018. "Imran Khan Resmi Menjabat PM Pakistan." *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/pdngbj370/imran-khan-resmi-menjabat-pm-pakistan>.

EENI Global Business School. n.d. "Muslim population by countries: Indonesia Saudi Arabia." EENI Global Business School. Accessed February 24, 2023. <http://en.reingex.com/Muslim-population-countries.asp>.

Embassy of Islamic Republic of Pakistan. Athens, Greece. n.d. "GUIDING PRINCIPLES OF PAKISTAN'S FOREIGN POLICY." Embassy of Pakistan, Athens, Greece. Accessed February 13, 2023.
<https://www.pakistanembassy.gr/foreign-policy>.

Ernst, Carl W., ed. 2013. *Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance*. New York City: Palgrave Macmillan.
10.1057/9781137290076.

Fadhlia, Wentiza, and Yusnarida E. Nizmi. 2014. "UPAYA ICNA (ISLAMIC CIRCLE OF NORTH AMERICA) DALAM MELAWAN ISLAMOPHOBIA DI AMERIKA SERIKAT." *Jom FISIP* 2, no. 1 (Februari): 1-3.

Farras, Bernhart, and CNBC Indonesia. 2018. "Krisis Neraca Pembayaran, Rupee Pakistan Anjlok." *CNBC Indonesia*, November 30, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181130184757-17-44505/krisis-neraca-pembayaran-rupee-pakistan-anjlok>

Fucsh, Christian. 20 Feb 2018. *Nationalism 2.0: The Making of Brexit on Social Media*. London: Pluto Press. 9781786802996.

GANA ISLAMIKA. 2019. "Pakistan (12): Merdeka – Gana Islamika." Gana Islamika. <https://ganaislamika.com/pakistan-12-merdeka/>.

Geo News. 2022. "UN finally recognises grave Islamophobia challenge confronting the world: PM Imran Khan." Geo.tv. <https://www.geo.tv/latest/405379-un-finally-recognises-grave-islamophobia-challenge-confronting-the-world-pm-imran-khan>.

Hashim, Asad. 2020. "Pakistan's Imran Khan urges Muslim unity against Islamophobia." *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/29/pakistans-khan-calls-for-muslim-unity-against-islamophobia>.

Hunter, Mary. 2022. "International Day to Combat Islamophobia: Responses and Rationales - Centre for Strategic and Contemporary Research." *cscr.pk*. <https://cscr.pk/explore/themes/social-issues/international-day-to-combat-islamophobia-responses-and-rationales/>.

Hussain, Zahid. 2022. "Imran should look at home before fighting

Islamophobia abroad.” Times of India.
<https://timesofindia.indiatimes.com/world/imran-should-look-at-home-before-fighting-islamophobia-abroad/articleshow/83660276.cms>.

International Monetary Fund. n.d. “What is the IMF?” International Monetary Fund. Accessed February 27, 2023.
<https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance>.

International Strategic Analysis. 2018. “The Importance of Military Power in the 21st Century: ISA.” International Strategic Analysis.
https://www.isa-world.com/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=411&cHash=3c3785562e7d5a836189b87d09c8182e.

IRA. 2019. “Pakistan, Malaysia dan Turki akan Luncurkan Saluran TV untuk Lawan Islamofobia.” KPI Pusat.
<https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/40-topik-pilihan-2/35328-pakistan-malaysia-dan-turki-akan-luncurkan-saluran-tv-untuk-lawan-islamofobia>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. “Developing Eight D 8 | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kementerian Luar Negeri.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/143/halaman_list_lainnya/developing-eight-d-8.

Kennedy, Emmet. 1979. ““Ideology” from Destutt De Tracy to Marx.”

Journal of The History of Ideas 40, no. 03 (July-September): 353-368.
<https://doi.org/10.2307/2709242>.

Kurnialam, Alkhaledi, and Ani Nursalikhah. 2022. "Imran Khan Serukan Pemimpin Muslim Bersatu demi Kepentingan Umat." *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/rnn66j366/imran-khan-serukan-pemimpin-muslim-bersatu-demi-kepentingan-umat>.

Latief, Muhammad N. 2020. "Imran Khan: Islamofobia muncul karena pemimpin Muslim gagal jelaskan Islam." *Anadolu Agency*.
<https://www.aa.com.tr/id/dunia/imran-khan-islamofobia-muncul-karena-pemimpin-muslim-gagal-jelaskan-islam/1724587>.

Macklin, Graham. 2019. "The Christchurch Attacks: Livestream Terror in the Viral Video Age." 12, no. 6 (July).
<https://ctc.westpoint.edu/christchurch-attacks-livestream-terror-viral-video-age/>.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. GOVERNMENT OF PAKISTAN.
n.d. "Guiding Principles and Objectives – Ministry of Foreign Affairs." Ministry of Foreign Affairs. Accessed February 13, 2023.
<https://mofa.gov.pk/guiding-principles-and-objectives/>.

Muhyiddin, and Muhammad Hafil. 2021. "Dampak Serangan 9/11 Bagi Muslim Afrika Setelah Dua Dekade." *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/qzbdfk430/dampak-serangan-911-bagi-muslim-afrika-setelah-dua-dekade>.

Mukri, Rusdiono. 2021. "Turki, Azerbaijan, dan Pakistan Latihan Militer Bersama 'Tiga Saudara.'" Gontornews. <https://gontornews.com/turki-azerbaijan-dan-pakistan-latihan-militer-bersama-tiga-saudara/>.

Pakistan Army. n.d. "Motto Of Pakistan Army." PAKISTAN ARMY. Accessed February 28, 2023. <https://pakistanarmy.gov.pk/>.

Pakistan Army. n.d. PAKISTAN ARMY. Accessed February 28, 2023. <https://pakistanarmy.gov.pk/index>.

Perkins, C. R. n.d. "1947 Partition of India & Pakistan | The 1947 Partition Archive - Spotlight at Stanford." Spotlight at Stanford. Accessed February 14, 2023. <https://exhibits.stanford.edu/1947-partition/about/1947-partition-of-india-pakistan>.

Radio Pakistan. 2022. "PM Imran first Muslim leader who highlights Islamophobia at UNGA: Qureshi." RADIO PAKISTAN. <https://radio.gov.pk/15-03-2022/pm-imran-first-muslim-leader-who-highlights-islamophobia-at-unga-qureshi>.

Rahmani, Ima S. 2022. "Rasisme, "Nir-tepasalira" Global, dan Islamofobia - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website." UIN Jakarta. <https://www.uinjkt.ac.id/rasisme-nir-tepasalira-global-dan-islamofobia/>.

Rehman, A. 1998. "The State and Civil Society in Pakistan." *The Lahore Journal of Economics* 03 (02): 149-154.

Sakinah, Kiki, and Nashih Nashrullah. 2021. "Efek Serangan 9/11 ke Muslim, Kisah Lawan Stereotip Teroris." *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qzaln7320/efek-serangan-911-ke-muslim-kisah-lawan-stereotip-teroris>.

Shahzad, Asif. 2022. "Pakistan expects multibillion-dollar support from Saudi Arabia." *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/pakistan-expects-multi-billion-dollar-support-saudi-arabia-sources-2022-12-12/>.

Shams, Shamil. 2018. "Imran Khan Janjikan Reformasi Luas – DW – 27.07.2018." *DW*. <https://www.dw.com/id/imran-khan-janjikan-reformasi-luas-keluarga-sharif-protas-hasil-pemilu/a-44847046>.

Shams, Shamil. 2019. "Pakistan: Protesters await deadline for PM – DW – 11/03/2019." *DW*. <https://www.dw.com/en/protests-against-pakistans-imran-khan-right-wing-vs-right-wing/a-51097687>.

Shantika, Eka, and CNN Indonesia. 2018. "Protes Hasil Pemilu Pakistan, Partai Tuntut Pemilu Ulang." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180728034154-113-317648/protes-hasil-pemilu-pakistan-partai-tuntut-pemilu-ulang>.

Tyrer, David. 2013. *The Politics of Islamophobia: Race, Power and Fantasy*. London: Pluto Press.

UN News. 2020. "Prime Minister Imran Khan of Pakistan warns of rising Islamophobia." *UN News*. <https://news.un.org/en/story/2020/09/1073782>.

UN News. 2020. "Prime Minister Imran Khan of Pakistan warns of rising Islamophobia." UN News. <https://news.un.org/en/story/2020/09/1073782>.

United States Institutes of Peace. 2018. "What will Pakistan's Foreign Policy Look Like Under Imran Khan?" United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2018/08/what-will-pakistans-foreign-policy-look-under-imran-khan>.

Vandebelt, Kristin. 2021. "The Post-September 11 Rise of Islamophobia: Identity and the 'Clash of Civilizations' in Europe and Latin America." *Insight Turkey* 2021 23, no. 02 (March): 145-168. 10.25253/99.2021232.9.

Webber, Mark, Michael Smith, David Allen, Alan Collins, Denny Morgan, and Anoushiravan Ehteshami. 2002. *Foreign Policy in a Transformed World*. 345 vols. N.p.: Pearson Education.

Zafitra, Alfa P. 2022. *ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN TERHADAP CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR (CPEC) DENGAN TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN IMRAN KHAN*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zaidi, Mosharraf, and Lynne O'Donnell. 2023. "Pervez Musharraf Obituary: Pakistan's Former President's Complicated Legacy." *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2023/02/05/pervez-musharraf-death-obituary-pakistan/>.